

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian Peneliti pada Pemerintah Daerah Kota Solok, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara Umum Kapasitas Sumberdaya manusia baik dari segi Pendidikan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat penatausahaan keuangan belum optimal dan belum didukung dengan latar belakang pendidikan yang kompeten dengan tugasnya sebagai pejabat/ pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi di SKPD.
2. Sistem Informasi yang mendukung untuk pelaksanaan Pengelolaan Keuangan, belum mampu mengakomodir semua kebutuhan yang terkait untuk penyelesaian pelaksanaan dan penyelesaian laporan keuangan pemerintah Kota Solok.
3. Sistem Pengendalian Internal belum dilaksanakan secara optimal (kurang dari 50%) SKPD yang mematuhi kebijakan pemerintah daerah yang mengatur regulasi dibidang keuangan. Belum adanya sanksi yang tegas terhadap ketidakpatuhan ini.
4. Kualitas laporan keuangan SKPD di Lingkungan pemerintah Kota Solok, belum mencapai kategori baik, mayoritas masih berada pada kategori kurang dan cukup, khususnya untuk penjelasan pos –pos laporan keuangan pada catatan laporan keuangan dan perhitungan serta penjelasan asset tetap.
5. Faktor yang mendukung baiknya kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Solok adalah pelaksanaan *Inservice training* yang dilaksanakan oleh Bidang akuntansi secara periodik (triwulan) untuk membantu PPK/staf SKPD dalam proses penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Dengan mengetahui kelemahan-kelemahan yang menyebabkan masih rendahnya kualitas Laporan keuangan Pemerintah daerah, SKPD dan SKPKD yang berperan dalam penyusunan Laporan Keuangan, segera memperbaiki dan mengatasi kendala-kendala yang menyebabkan rendahnya kualitas Laporan Keuangan.

Fokus perhatian pimpinan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah Kapasitas Sumberdaya Manusia, Teknologi Informasi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern. Fakta Menunjukkan bahwa Kapasitas SDM, Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern pada subbag keuangan SKPD Pemerintah Kota Solok, belum memadai

Kebijakan yang dapat dilakukan adalah dengan menempatkan Pegawai dengan latar belakang Pendidikan minimal D3 akuntansi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan atau sebagai staf yang melaksanakan fungsi akuntansi di SKPD. Kebijakan lain, dengan kurangnya Pegawai dengan latar belakang pendidikan akuntansi dengan diadakannya formasi jabatan Penata Laporan Keuangan dan Verifikator Keuangan dilingkup Pemerintah Kota Solok. Penata laporan keuangan bertugas untuk menyajikan laporan keuangan, sementara Verifikator Keuangan bertugas untuk menverifikasi administrasi keuangan dan memeriksa laporan pertanggungjawaban, dan memeriksa apakah data belanja, data penerimaan SKPD telah dientry dengan benar dan telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Analisis Jabatan juga sebagai elemen yang penting sehingga nantinya akan diperoleh SDM yang berkompeten dan memenuhi kriteria yang diharapkan.

Untuk pengembangan kompetensi SDM pada Pemerintah daerah, diberikan kesempatan untuk staf mengikuti pelatihan / pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan serta penyusunan laporan keuangan. Pendidikan / Pelatihan dilakukan secara berkala dan rutin sehingga diperoleh SDM yang memiliki kompetensi dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Pengembangan kompetensi SDM perlu difasilitasi dengan teknologi Informasi yang memadai. Teknologi Informasi memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah dimulai dari aspek perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban yang hasil akhirnya berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk kedepan perlu kajian apakah akan tetap menggunakan aplikasi SIPKD, atau beralih menggunakan sistem Informasi yang dikembangkan oleh Lembaga Pemerintah Lain atau menggunakan aplikasi sendiri yang mampu mengakomodir semua kebutuhan dalam pengelolaan keuangan daerah sampai hasil akhir tersusunnya Laporan Keuangan. Dengan kajian mempertimbangan aplikasi lain dalam pengelolaan keuangan daerah nantinya dapat dipilih opsi terbaik, baik dari sisi efisiensi biaya, keandalan program, kemudahan dalam pengoperasian, pemeliharaan sistem.

Sistem Pengendalian Intern, bagian yang perlun perhatian penting. Ketidapatuhan SKPD dalam pelaksanaan APBD terhadap kebijakan / regulasi pemerintah daerah yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Ketidapatuhan terhadap aturan dan pelaksanaan SPI yang tidak optimal mengurangi kualitas Laporan keuangan SKPD, antara lain terjadinya kesalahan entry, ketidapatuhan terhadap peraturan. Sehingga hasil akhirnya Laporan keuangan SKPD tidak disusun dengan data yang valid yang belum diyakini kebenarannya.

Perlu dilakukan evaluasi yang efektif dalam pendelegasian tugas untuk penyiapan Laporan keuangan dan pelaksanaan akuntansi PPK-SKPD kepada staf subbag keuangan/staf PPK-SKPD. Dalam pendelegasian tugas harus benar-benar selektif dalam memilih staf. Hasil Penelitian menunjukkan peran PPK- SKPD tidak terlalu berpengaruh, karna 90 persen tugas PPK SKPD dalam penyusunan Laporan Keuangan dilaksanakan oleh staf PPK SKPD. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD di lingkup Pemerintah Kota Solok perlu dilakukan evaluasi kinerja secara rutin kepada pegawai/staf yang telah diberi tugas oleh PPK-SKPD.

C.Saran

Adapun saran / rekomendasi sebagai langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD :

1. Perlu segera mengatasi kurangnya pegawai /staf berlatar belakang akuntansi di SKPD yaitu pada subbag keuangan. Langkah yang dapat dilakukan antara lain: pengalokasian formasi untuk pengadaan CPNS tahun selanjutnya dan mutasi pegawai dari Kab/Kota/Daerah lain .
2. Perlu diadakan pemetaan SDM oleh SKPD terkait dengan pemutasian pegawai, sehingga untuk pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi ditempatkan di subbag akuntansi, dan untuk kelebihan pegawai yang berlatar belakang akuntansi untuk SKPD dapat dimutasikan ke SKPD yang kekurangan staf dengan latar belakang akuntansi.
3. Melakukan pendidikan / pelatihan / bimbingan teknis/ kursus tentang keuangan daerah bagi para pegawai/staf secara rutin dan periodik untuk meningkatkan kualitas SDM di SKPD
4. Pertimbangan untuk penggunaan sistim informasi yang secara komprehensif dapat digunakan dari proses perencanaan sampai pelaporan keuangan.
5. Pengoptimalan rekonsiliasi SKPD dengan Melibatkan semua bidang/unit yang terkait (PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pengurus Barang dan Bendahara Umum Daerah) secara periodik minimal sekali enam bulan
6. Merumuskan sistem pengendalian internal yang mengatur dari Proses Pelaksanaan sampai pertanggungjawaban, yang mengatur lebih tegas tentang pembagian tugas dari struktur Pengelola Keuangan, serta sistem pelaksanaan APBD
7. Harus dirumuskan sistem pertanggungjawaban keuangan yang menerapkan sistem reward dan punishment terhadap ketidakpatuhan dengan sistem pengendalian intern.

